

Wahana Vol. 1, No.8, Genap, Tahun 2011-2012

ISSN. 0853-5876



Wahana

JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA



**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

PELINDUNG:

Rektor Universitas Pakuan
(Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.)

PENANGGUNG JAWAB:

Dekan Fakultas Sastra Unpak
(Agnes Setyowati, M.Hum.)

DEWAN PAKAR:

Prof. Dr. Partini Sardjono
Prof. Dr. Sapardi Djoko D.
Prof. Dr. Soenarjati Dj.

REDAKTUR/EDITOR BAHASA:

Dadan Suwarna, Drs.
Nurtriana Rizkawati, M.Si.

STAF REDAKSI:

Rina Fitriana, M.Hum.
Shita Dewi Ratih P., M.Hum.
Sasongko S.Putro,S.S.,M.M.
Prpto Waluyo, M.Hum.
Teguh Imam Subarkah, M.Hum.
Ade S.Natawiria,M.Si.
Henny Suharyati, M.A.
Tetty Yukesti, M.A.
Muslim, M.Si.
Nur Utami Sari'at K., M.Hum.
Sari Rejeki, M.Hum.
Dadan Suwarna, Drs.
Nurtriana Rizkawati, M.Si.
Dini Valdiani, S.Sos.
Mugiyanti, M.Si.
Mariana Siregar, M.Ikom.
David Rizar, S.S., M.Si.
Helen Susanti, M.Si.

Farid Adli, S.S.

Ni Made Widisanti, S.S.

Dedi Yusar, S.S., M.Pd.

Hanny Harashani,M.Si.

Philips Abdullah,M.Hum.

Dr. Leany N. Harsa, M.Si.

Yuyus Rustandi, S.Sn., M.Pd.

Atang Supriatna, S.Sn., M.Pd.

Prpto Waluyo, M.Hum.

ALAMAT REDAKSI:

Fakultas Sastra Universitas Pakuan
Jalan Pakuan Kotak Pos 452 Bogor
Telp: 0251-8338650
Laman: www.sastraunpak.net
Surat-e: sastrapakuan@gmail.com

Salam Redaksi

Sebagai ajang gagasan, media ini mencoba menghadirkan beragam kajian yang berkaitan dengan perspektif manusia. Keberadaan manusia adalah yang sepenuhnya ditentukan oleh ideologi, kepentingan, sudut pandang, juga cakupan ilmu yang melatarbelakangi kajian.

Sebagai subjek, manusia adalah kita atau para observer, peneliti, penilai yang tengah menentukan kajian ilmu tertentu dalam hubungannya dengan posisi integral manusia lain yang tengah dikaji hingga diklasifikasikannya. Inilah tesis dan sekaligus antitesis tentang keberadaan manusia dalam ragam tarik-ulur. Sebagai sumber kajian, yang juga adalah komponen data, manusia adalah juga bagian relasi dari objek yang didudukkan dalam telaah ilmu budaya, bahasa, sastra, juga komunikasi. Ia tidak pernah "berdaya" justru oleh keberadaannya untuk berada dalam objek yang ditentukan kapasitas bahkan kompetensinya.

Perspektif tentang subjek dan objek kemudian menyangkut apa yang diposisikan dan siapa yang memosisikan. Bila pengarang, dalam dunia fiksi adalah subjek yang akan demikian menentukan "kelangsungan hidup manusia lain", justru sebagai objek, dengan demikian manusia adalah yang ditentukan ketokohnya oleh manusia yang lain juga sebagai sekumpulan ang-

ka dan data. Ia tidak mempunyai wewenang apa pun, selain kedudukannya yang taken for granted dalam hitungan kualitatif ataupun kuantitatif.

Dalam kajian komunikasi, misalnya, manusia adalah sebuah kajian dalam kolektivitasnya dengan manusia lain guna menentukan sebuah asumsi atau hipotesis tentang pembuktian atau penggugatan teori-teori besar (grand theory). Pada titik ini, bahasa adalah cara lain melacak mereka, menelaahnya, sebagai formula yang akan menentukan bagaimana ekspresi dan identitas itu mencapai titik temu.

Dengan demikian, sebagai objek manusia adalah juga sampel atau populasi yang tetap harus diukur guna mencari hipotesis atau asumsi yang menjelaskan gejala di balik peristiwa apa pun. Dengan kata lain, perspektif tentang manusia adalah yang tetap menghadirkan dirinya dalam banyak bingkai, sebagai subjek (pusat penceritaan), objek (sumber data), atau siapa pun yang menentukannya dalam sebuah permasalahan besar yang ditarik dalam beragam kebutuhan keilmuan.

Inilah catatan dalam melihat pokok bahasan dan gagasan dalam Wahana kita kali ini. Selamat membaca!

AFTAR ISI

alam Redaksi	i	Imperialisme Kebudayaan dalam Televisi Nasional	Nurtriana Rizkawati	54
he Utilization Process of Utterance	Tri Rezeki	Ragam Penggunaan Bahasa Gaul dalam Bahasa Indonesia dan Jepang	Alo Karyati	66
erilaku Pemuda dalam Memanfaatkan Media Massa untuk Pencarian Informasi Pertanian	Agaprasta Adinugraha, Imani Valdiani	Campur Kode dalam Majalah Remaja GO GIRL!!	Nur Utami Sari'at Kurniati	73
resiasi Sastra dalam Wahana Teater Kalangan Pelajar	Iyus Rustandi	Tema Kemanusiaan dalam Cerpen-cerpen Martin Aleida	Dadan Suwarna	79
ndidikan Public Speaking sebagai Pengasah Kecerdasan Anak dan Remaja	wi Rini Sovia Firdaus	Kekerasan terhadap Perempuan Pelaku Kawin Kontrak	Henny Suharyati, Hanny Harashani	86
tidaklangsungan Verbal sebagai Salah Satu Ciri Kesantunan Berbahasa Masyarakat Jepang	na Fitriana	Dongeng Etnografis: Tambo Sakti Alam Kerinci dalam Analisis Struktural Levi-Strauss	Agatha Trisari S.	96
edia Massa sebagai Agen Perubahan Sosial Masyarakat dalam Era Reformasi Muslim	Kali Besar: Memori Traumatis Etnis Cina di Sudut Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta	Ni Made Widisanti S.	109
nshin Funin, Dampak Sistem Manajemen Jepang			
len Susanti	47			

Daftar Pustaka

- Nakadaira, Hiroto. 2006. *Journal of Occupational Health*.
- Pfister, Jan A. 2009. *Managing Organizational Culture for Effective Internal Control*. Verlag Berlin Heidelberg. Springer Physica
- Seng, Ann Wan. 2006. *Rahasia Bisnis Orang Jepang* (Terjemahan). PT. Mizan Publika. Jakarta.
- Sugimoto, Yoshio. 2002. *An Introduction to Japanese Society Second Edition*. New York. Cambridge University Press.
- Sugimoto, Yoshio. 2010. *An Introduction to Japanese Society Third Edition*. New York. Cambridge University Press.
- Surajaya, I Ketut. 1996. *Diktat Pengantar Sejarah Jepang I*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tidak Dipublikasikan
- Tobing, Ekayani, Dr. 2006. *Keluarga Tradisional Jepang dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*. Depok. Iluni KWJ.
- <http://www.jpri.org/publications/>, tentang "Working Papers", diakses tahun 2012
- <http://www.jisho.org>, tentang "Tnshin Funin", diakses tahun 2012.

IMPERIALISME KEBUDAYAAN DALAM MEDIA TELEVISI NASIONAL

Nurtriana Rizkawati*

Abstrak

Globalisasi industri telah merasuk ke semua lini, tidak termasuk media. Salah satu media yang berperan aktif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi adalah media televisi. Sistem yang terbuka semenjak era orde baru membuka peluang dalam bisnis televisi bagi para pengusaha. Para pengusaha dalam televisi membawa suatu misi-misi tertentu lewat media tabung tersebut. Misi tersebut memunculkan imperialisme kebudayaan pada masyarakat di Indonesia yang masih memiliki kesadaran rendah terhadap penyebaran imperialism kebudayaan tersebut.

Kata-kata Kunci: *Imperialisme Kebudayaan, Media Televisi.*

PENDAHULUAN

Sebenarnya sekarang ini adalah zamannya media. Hidup kita "dikepung" media, rasa-rasanya sulit untuk tidak hidup dengan media. Sebagian atau bahkan banyak dari pengetahuan dan informasi yang kita miliki kita peroleh dari berbagai media. Berbicara citra mengenai apapun, apakah itu manusia dan benda, yang melekat pada diri kita, sebagian besar dibentuk oleh media. dalam konteks kemampuan dalam pembentukan citra, media berperan sangat besar.

* Nurtriana Rizkawati, S.P., M.Si., Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra, Universitas Pakuan.

Seperti yang disampaikan para pengusung kapitalisme seperti Friedman dari Surat Kabar The New York Times, Amerika Serikat bahwa ras manusia telah memasuki masa keemasannya, ia hanya duduk, diam dan belanja, biarkan pasar dan teknologi yang melakukan sisanya. (*all people needs is sit back, shut ups dan shop and let markets and technologies work their magical wonders*) (Dahl, 2006).

“Indonesia pun tak terkecuali tengah berada dalam pusaran gejolak tersebut. Kalau dulu Indonesia menghadapi tantangan imperialisme fisik, kini pemuda Indonesia dihadapkan pada imperialisme fisik secara ekonomi, politik, namun sekaligus imperilaisme kasat mata berupa eksploitasi kebudayaan, SDM dan terorisme. Bila dulu menghadapi masalah bagaimana membangun solidaritas nasional untuk menyiapkan Indonesia merdeka, kini juga dihadapkan pada ancaman disintegrasi bangsa yang sangat gawat. Benarkah kita telah terjajah secara budaya? Benarkah televisi kita tidak mampu lagi menjadi cerminan kebudayaan ideal nasional? Perubahan sosial seperti apa yang menjadi dampaknya? Makalah ini sedikit mencoba memaparkan rumusan tersebut.”

TINJAUAN PUSTAKA

Globalisasi

Globalisasi pada hakikatnya adalah proses yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan (nation-hood) dan kenegaraan (state-hood). Mengingat bahwa jagad ke-

manusiaan ditandai oleh pluralitas budaya, maka globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai peristiwa yang melanda dunia secara lintas-budaya (trans-cultural). Dalam gerak lintas-budaya ini terjadi berbagai pertemuan antar-budaya (cultural encounters) yang sekaligus mewujudkan proses saling-pengaruh antar-budaya, dengan kemungkinan satu pihak lebih besar pengaruhnya ketimbang pihak lainnya (Hassan, 2000).

Pertemuan antar-budaya memang menggejala sebagai keterbukaan (exposure) pihak yang satu terhadap lainnya; namun pengaruh-mempengaruhi dalam pertemuan antar-budaya itu tidak selalu berlangsung sebagai proses dua-arah atau timbal-balik yang berimbang, melainkan bolehjadi juga terjadi sebagai proses imposisi budaya yang satu terhadap lainnya; yaitu, terpaan budaya yang satu berpengaruh dominan terhadap budaya lainnya

Dalam sejarah kemanusiaan banyak contoh yang menunjukkan, bahwa timbul-tenggelamnya kebudayaan sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam pertemuan antarbudaya, yaitu sejauh mana satu di antara pihak yang saling bertemu kurang atau tidak lagi memiliki ketahanan budaya (cultural resilience). Kebudayaan adalah suatu daya yang sekaligus tersimpan (latent) dan nyata (actual).

Demikianlah kebudayaan mengandung dua daya sekaligus, yaitu sebagai daya yang cenderung melestanikan dan daya yang cenderung berkembang atas kemekarannya sendiri. Antara kedua daya inilah tiap masyarakat pendukung kebudayaan tertentu berada; satu daya mempertahankannya agar lestari dan daya lainnya menariknya untuk maju; satu daya dengan

kecenderungan preservatif dan satunya lagi dengan kecenderungan progresif.

Dalam kondisi demikian itulah pertemuan antar-budaya sangat berpengaruh atas perimbangan antara kedua daya tersebut. Sampai batas tertentu dan saling-pengaruh yang terjadi itu dapat terpantul seberapa tinggi derajat kesadaran dan tingkat ketahanan budaya masing-masing pihak yang saling bertemu. Tangguh atau rapuhnya ketahanan budaya biasanya dilatani oleh menurunnya kesadaran masyarakat yang bersangkutan terhadap kebudayaannya sebagai pengukuh jatidirinya. Makin rendah derajat ketahanan masyarakat pendukungnya, makin kuat pula pihak asing yang berpengaruh dominan terhadap masyarakat itu.

Nilai kajian yang muncul dalam 20 tahun terakhir yang berhubungan dengan imperialisme kebudayaan (atau ideologi) mengindikasikan perhatian para sarjana komunikasi Amerika Latin, Eropa, bahkan di Amerika Serikat, perhatian terhadap kajian tersebut mencakup penganalisisan faktor eksternal struktur kekuatan yang mempengaruhi atau mengendalikan media massa di negara berkembang. Serta dominasi negara maju dalam aliran informasi dan hiburan (Chaffe, 2002)

Beltrand dan DeCardona, 1980 dalam Dahl (1988) telah menambahkan beberapa topik kepada agenda penelitian bidang ini. Perhatian mereka dipusatkan pada organisasi propaganda resmi (seperti US information Agency, dan CIA). bagi kalangan ilmuwan aliran kritis dan mereka yang menyokong perubahan sosial radikal, kajian tersebut telah memunculkan bentuk skeptisisme, globalisasi yang

sering digambarkan sebagai kekuatan alamiah yang tak bisa tdiawartawar lagi, tapi lebih sebagai tujuan utama kapitalisme. penuh dengan peyelewengan dan bermuatan ideologi.

Term superioritas neo liberalisme yang mengacu pada serangkaian kebijakan nasional dan internasional yang menyokong dominasi bisnis dalam setiap urusan sosial dengan minimalisi kekuatan oposisi. Neoliberalisme akan selalu terkait dengan keyakinan atas kemampuan pasar dalam menggunakan teknologi baru untuk mengatasi masalah-masalah sosial dibandingkan dengan alternatif lain. Intinya tidak mengecualikan kebutuhan akan deregulasi media komersil dan pasar komunikasi (Steger, 1989).

Kekuatan pendorong utamanya adalah pengejaran yang tak berkesudahan keuntungan sebagai ciri kapitalisme, yang menekankan pergantian dan deregulasi neoliberal. Dalam media, hal ini bisa berarti relaksasi atau bahkan eliminasi hambatan eksploitasi komersial media dan kepemilikan media yang telah terpusat (Steger, 2004).

Sekali deregulasi nasional media dilaksanakan di negara besar seperti AS dan Inggris, mengikuti kesepakatan AFTA dan pembentukan WTO semuanya dilakukan untuk memuluskan investasi dan penjualan perusahaan multinasional pada tingkat regional dan pasar global. Memungkinkan pembentukan sistem media global, yang didominasi oleh konglomerat tadi. Sekarang semuanya menjadi logis, perusahaan harus menjadi lebih besar lagi dan beragam un-

tuk menghindari resiko dan meningkatkan kesempatan penciptaan keuntungan dengan menguasai dunia untuk menghindari kepungan para pesaing.

Sistem Media Global

Media komunikasi, dalam hal ini media massa, memiliki fungsi-fungsi bagi masyarakat. McQuail mengemukakan fungsi-fungsi media massa sebagai pemberi informasi, pemberi identitas pribadi, sarana intergrasi dan interaksi sosial dan sebagai sarana hiburan (Denis McQuail, 2000).

Pada masa lalu sistem media terutama berbasis kebangsaan, namun dalam beberapa tahun belakangan pasar media komersil global bangkit. Oligopoli internasional memiliki sisi bertentangan namun saling berkaitan. Pertama, dominasi perusahaan-perusahaan media, terutama dari Amerika Serikat, di seluruh dunia dalam kecepatan yang mematahkan tulang. Dengan tujuan kapitalisasi pasar luar negeri – tanpa mendapat kepungan kompetitor – semenjak pasar lokal AS hanya memberi kesempatan ekspansi terbatas. Kedua, konvergensi dan konsolidasi dilakukan sebagai trend masa kini. Industri media spesifik semakin terkonsentrasi, dan pemain dominan dalam masing-masing industri adalah perusahaan anak dari konglomerat-konglomerat media raksasa. Tingkat merger dan akuisisi sangat memprihatinkan (Dahl, 2005).

Mengapa hal ini terjadi, penjelasan konvensional adalah teknologi, pengembangan radikal teknologi komunikasi membuat kerajaan media global mudah dan menguntungkan, sesuatu hal yang tidak terpikirkan di masa lampau. Hal yang serupa dengan penjelasan teknologis bagi walaupun penjelasan ini belum lah lengkap

Cara yang terbaik untuk mengerti sedekat apa sistem media komersial global terkait dengan ekonomi neoliberal global adalah dengan melihat peran periklanan. Periklanan adalah pengeluaran bisnis perusahaan terbesar dalam ekonomi kapitalis. Sistem media komersial berperan sebagai sabuk transmisi perusahaan dalam memasarkan produk mereka di seluruh dunia; globalisasi tak akan ada tanpanya. sebesar $\frac{3}{4}$ pengeluaran periklanan global jatuh ke hanya 300 perusahaan media. Pengeluaran periklanan tumbuh dalam lompatan serta mengikat dalam dekade terakhir, sejalan dengan keterbukaan televisi dengan eksploitasi komersial, dan tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan GDP.

Di sisi lain masih terdapat titik pembicaraan dalam menempatkan sistem media global dalam perspektif yang selayaknya. Pasar media global dikitari oleh enam sampai tujuh lusin perusahaan yang secara nasional maupun regional menguasai ceruk pasar seperti bisnis atau perdagangan penerbitan. Antara 2.3 sampai dengan setengah tier kedua ini berasal dari amerika utara; kebanyakan sisanya dari eropa barat dan jepang. Banyak konglomerat nasional regional telah mapan di bisnis televis tier ketiga adalah raksasa di bidangnya yang sering masuk dalam ranking perusahaan terbesar dunia dengan pengeluaran lebih dari US\$1 Miliar dengan sistem yang masih terus berkembang. Sistem media global hanya sebagian yang kompetitif dalam arti ekonomis, kebanyakan perusahaan besar memiliki sahan diantara satu dengan yang lainnya, atau dewan direktur yang saling mengikat.

Kekhawatiran yang paling tampak justru muncul di negara-negara sekutu terdekat AS. Di Kanada, karena kekhawatirannya dengan apa yang disebut *the invasion from the South*, Pemerintah Kanada memiliki Kementerian Warisan Budaya. Tugasnya menjaga budaya Kanada dari serbuan "Selatan" (Amerika Serikat). Kanada layak khawatir karena memang dibanjiri media dan produk budaya AS (Steger, 2002).

Anehnya, di Indonesia kehadiran media asing justru tidak dianggap sebagai ancaman. Malah dinilai sebagai keniscayaan, bahkan berkah. Tak ada upaya untuk melindungi budaya nasional secara serius. Bahkan, banyak orang berpikir, semua itu bisa diatasi dengan mekanisme pasar, pemikiran yang khas neoliberalisme.

Mengapa demikian? Mungkin kita memang bangsa yang terbuka. Tapi, bisa jadi kondisi itu by design "dipersiapkan". Dalam ekonomi, John Perkins dengan buku *The Confession of an Economic Hitman* (2004) mengakui telah memberi nasihat dan menjadikan ekonomi Indonesia bergantung pada Barat. Maka dalam kebudayaan, sangat mungkin ada cultural hitman, yaitu orang-orang yang mendorong Indonesia menerapkan budaya neoliberal. Bedanya, di sektor ekonomi ada yang mengaku memang telah "menjerumuskan" ekonomi Indonesia. Sementara itu, untuk kebudayaan, belum ada yang mengaku.

PEMBAHASAN

Sistem Media Indonesia

Indonesia telah mengalami pasang surut media massa yang sangat panjang. Bila dahulu ukuran budaya dan politik dalam konteks penentangan terhadap gejala imperialisme kebudayaan melalui jalur politis dengan menjamurnya pembentukan

lembaga kebudayaan tiap partai politik di era demokrasi terpimpin.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, perhatian pemerintahannya terhadap bidang politik dibandingkan pada bidang sosial kemasyarakatan lain tercermin dari kesadaran pemerintahannya menggunakan pendekatan kebudayaan sebagai alat perjuangan dalam mencapai tujuan untuk mencapai stabilitas politik yang rusak selama revolusi fisik 1945-1949. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menyerukan rakyat untuk mengembangkan dan menumbuhkan kebudayaan nasional dengan slogan "*Banting Stir di Bidang Kebudayaan!*", *Berantas dan kikis habis semua pengaruh buruk dan jahat dari kebudayaan Nekolim, negara kapitalis. Berdikarilah di bidang kebudayaan* (Budiawan, 2004).

Dalam prakteknya, lembaga lembaga seperti Lekra telah secara akomodatif dan toleran terhadap kebudayaan rakyat (termasuk keragaman kebudayaan) serta kritis terhadap penyebaran '*pornographic books illustrated with pictures of half-naked women, immoral films and love songs*' pada saat yang sama. ia secara cerdas memberi pemaknaan terhadap kebudayaan pada tingkat praksis meski tanpa menggunakan jargon 'keagamaan', sesuatu yang hingga saat ini masih sangat sensitif untuk digunakan sebagai alat penilai dan pengukur.

Keadaan tersebut berbalik arah pada saat memasuki era Presiden Soeharto, dengan pendekatan sentralistik, media massa dikooptasi secara tunggal untuk kepentingan program pemerintah. Berbagai aspek dalam media massa dimobilisasi untuk mendukung dan tanpa reserve atau menghadapi resiko pembredelan. Kecenderungan kapitalisasi media diteruskan dalam masa reformasi sampai saat ini.

Tendensi Imperialisme Kebudayaan dalam Media Massa Indonesia

Wuryanta (2006) mencatat dampak globalisasi media pada tata sosial masyarakat Indonesia terdapat garis positif atau konstruktif serta garis negatif atau destruktif. Garis positif akibat konstruktif fenomena globalisasi media massa di Indonesia adalah perubahan sosial politik yang meliputi keterbukaan, penonjolan tiga isu global (demokratisasi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup) termasuk juga kebebasan pers sebagai bagian integral sistem komunikasi sosial masyarakat. Sementara itu, garis negatif dalam arti dampak buruk dari globalisasi media dapat juga dilihat dari fenomena masyarakat yang semakin konsumeristis, apatis, individualistis dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa globalisasi media massa juga memicu kerusakan etika atau moral kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Beberapa dampak negatif yang perlu dicatat adalah

1. Membuka kondisi dunia yang borderless world. Kondisi dunia tanpa batas ini mengakibatkan apa yang sering disebut dengan penyeragaman secara global dalam sistem, pola dan budaya komunikasi dunia dan Indonesia pada khususnya. Masalahnya terjadi paradoks yang muncul di dalam gejala ini, yaitu ketika dunia dan globalisme memicu penyeragaman cara, sistem komunikasi umat manusia, di situ juga terjadi budaya tanding dalam bentuk tren nasionalisme, primordialisme, lokalisme kebudayaan. Ini artinya dalam globalisasi, termasuk di dalamnya globalisasi media massa, terjadi tarik ulur kecenderungan holisme-

kolektivistik dengan tendensi parsialisme-individualistik manusia.

2. Kebijakan media global. Setidaknya ada dua dimensi dalam kebijakan media global, yaitu kebijakan internal (editorial) yang bersifat horizontal dan kebijakan politik-ideologi pelaku media yang bersifat vertikal. Dalam perkembangan kapitalisme global tidak jarang kedua dimensi tersebut saling bertabrakan kepentingan. Tarik ulur kebijakan politik-ideologi yang dimiliki oleh pelaku media terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Pada saatnya, kebijakan-kebijakan publik tersebut saling silang dengan kepentingan dan kebijakan pelaku media dalam konteks industri media yang mereka buat. Perbenturan kepentingan antara kebijakan internal dan eksternal yang ada dalam konteks budaya komunikasi di Indonesia rupanya juga mempengaruhi bagaimana prinsip kebebasan pers harus dimaknai.
3. Memperlebar jurang perbedaan atau kepincangan arus informasi yang terjadi antara negara-negara maju di satu pihak dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, di lain pihak. Tahapan konsentrasi dominasi sistem komunikasi global ini melahirkan apa yang dinamakan dengan imperialisme budaya global.
4. Timbulnya masalah bagaimana sistem sosial dan hukum nasional mewadahi berbagai ragam kepentingan yang masuk dan terpenetrasi secara ideal maupun nilai yang ditawarkan oleh media global. Artinya bahwa informasi

pasar global yang diwujudkan dalam ide-ide komunikasi sosial masuk ke negara-negara berkembang tanpa melalui sensor yang diperlukan. Konsekuensi logis globalisasi yang bersifat borderless society mengakibatkan penetrasi tanpa batas tanpa perlu mengindahkan kedaulatan negara, masyarakat, dan individu.

5. Kelima, akibat point keempat dapat terlihat dengan munculnya berbagai masalah terutama pada masalah etis produksi, distribusi dan konsumsi isi media yang berisi tentang bagaimana hak privasi dapat dilindungi ketika hak tersebut berbenturan dengan hak publik untuk mengetahui. Ini berarti bahwa dampak negatif dari globalisasi media tidak hanya berhenti pada tataran sosial-kolektif, tetapi juga pada tataran individual.
6. Keenam, munculnya masalah sumber manusia yang menjadi pelaku media. Ketika media global masuk ke sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, tentu saja standarisasi sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan ukuran internasional. Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang media masih memprihatinkan. Masalahnya adalah ketika masalah SDM ini mencuat sebagai masalah global dapat kita tarik garis lurus lalu bagaimana kualitas isi pemberitaan. Ketika kualitas isi media lokal masih memprihatinkan, maka pertanyaan kritis lainnya adalah apakah memang media massa kita masih bisa dipercaya? Lebih baik percaya dengan media global yang sudah diketahui kualitas SDM diban-

dingkan dengan kualitas wartawan, reporter, kameramen, produser media yang ada dan hidup di Indonesia. Hal ini nantinya akan berpengaruh dengan soal prioritas nilai persaingan yang harus dihadapi oleh para pelaku media di Indonesia (Wuryanta, 2006).

Media, dalam perspektif imperialisme kebudayaan dianggap sekadar perpanjangan tangan atau instrumen yang dipakai untuk menyebarkan citra tentang konstruk sosial dalam masyarakat. yang sudah terbentuk dalam kenyataan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, media lebih merepresentasikan sisi normatif pandangan masyarakat tentang citra dirinya sendiri. Media, melalui mekanisme menayangkan atau menggambarkan kembali, melalui iklan, berita, features, dan sebagainya, rekonster

Lihat bagaimana Metro TV merujuk media besar CNN untuk liputan peristiwa WTC 11 September 2001 atau Indosiar yang merujuk VOA TV, atau beberapa radio FM Jakarta yang mempunyai jaringan radio lokal daerah dengan merujuk radio BBC London-Voice of Amerika untuk El Shinta FM 90,05 atau Deutsche Welle untuk Jakarta News FM, dan sebagainya.

Lihat saja berbagai berita politik, ekonomi, gosip selebritis yang bisa diubah menjadi komoditas ekonomi yang laris), konsentrasi media secara horizontal, vertikal dan perusahaan multinasional, misalnya Indosiar dalam Salim Group merupakan salah satu diversifikasi horizontal, vertikal

dari kekuatan ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Kelompok Salim, kelompok Kompas-Gramedia yang mempunyai beberapa majalah, tabloid, koran-termasuk di dalam koran daerah, hotel, toko serba ada, *tour travel agent*, radio sonora, TV7 (Mosko, 1996; Giddens, 1999 dalam Wuryanta, 2006).

Keadaan industri hiburan televisi kita tidak jauh berbeda. sinetron kita pun sangat payah dalam mempertahankan identitas sendiri dalam jagat komunikasi massa. Perubahan tata nilai ini, dalam contoh kecil manusia-manusia sinetron. Menurutny, dengan tanpa disadari bahkan sangat mereka banggakan, orang-orang Indonesia (dalam sinetron itu) mengubah dirinya menjadi manusia berwajah bule, rambut pirang, dengan gaya hidup hedonistik yang sama sekali jauh dari identitas bangsanya sebagai bangsa Melayu. Akibat yang terjadi, sudah dapat ditebak. Mereka -- manusia-manusia sinetron itu -- menjadi manusia sungguhan dalam realitas nyata yang lahir dalam pandangan, pola hidup, dan gaya hidup manusia korban imperialisme kebudayaan.

Bias Gender dalam Sinetron nasional telah lama memeperteguh nilai sifat-sifat feminim yang dilekatkan pada diri perempuan. Umpamanya keharusan untuk lebih mempertimbangkan emosi ketimbang pikiran, berperilaku halus dan lemah-gemulai dari pada kasar, serta peran sosialnya yang mesti berkiprah di ranah rumah tangga (*domestic domain*) bukan di ranah publik (*public domain*), yang sejak lama dibentuk masyarakat.

Masuknya Cosmopolitan, PC Mild serta berpuluh majalah terjemahan den-

gan "kandungan lokal" yang minimal termasuk kontroversi "indigenasi" Playboy telah bergeser bukan sekadar persoalan moral, tapi juga telah memasuki ranah budaya. Peredarannya menyiratkan semakin kuatnya imperialisme budaya yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan rezim komunikasi dunia.

Tapi sayangnya, masyarakat umum belum mau sepenuhnya memahami hal itu. Banyak warga yang masih meyakini bahwa perbedaan identitas mental dan posisi sosial itu sesuatu yang kodrati dan terus-menerus dimasyarakatkan. Dalam konteks ini, sedikit banyak, media massa ikut mempertahankan dan terus membakukan asumsi-asumsi perbedaan gender sebagai sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Melalui penambahan citra itu, sesungguhnya media, langsung atau tidak, telah melakukan diskriminasi. Dalam konteks ini, media, disengaja atau tidak, telah mengabaikan kelompok perempuan lain. Dengan kata lain, media telah membangun citra yang negatif bagi sebagian kelompok yang memiliki ciri-ciri yang tidak ditampilkan dalam ragam media itu.

Setidaknya dalam refleksi ilmiah, fenomena imperialisme budaya terutama yang sekarang kita alami mempunyai dua sifat yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama soal sifat satu-arah dari aliran media internasional, di mana aliran besar dipasok dari ciri, visi, opini produk media negara maju. Sementara itu, sifat yang lain terlihat bahwa proses pengaruh dalam sejumlah kecil negara berkembang memperhitungkan substansi pengaruh media internasional.

Perubahan Sosial dalam Perspektif Imperialism Kebudayaan

Kebudayaan akan selalau ada selama ada pendukungnya, suatu perubahan sosial (dalam Salim, 2002) Media Massa Indonesia berkembang secara alamiah, namun jika diperhatikan, dari perspektif sejarah, bahwa gejala imperialisme kebudayaan melalui media massa tidak lepas dari karakter budaya masyarakat Indonesia sendiri yang sangat rentan untuk dipengaruhi oleh pihak luar.

Hal ini bisa menjelaskan posisi resistensi budaya nasional, kemudian kosmopolitanisme terakhir kebijakan otoriter yang memungkinkan terjadinya penyeragaman kebudayaan. Proses, ketika keran tersebut terbuka dimana keterbukaan menjadi jargon yang meluas dalam masyarakat, telah menimbulkan kegagalan dalam masyarakat dalam menyikapi berbagai penyimpangan- penyimpangan dan penyetiran selera dalam masyarakat.

Terjadinya pergeseran kearah konsumerisme yang jauh dari kenyataan yang adil dalam masyarakat. Keprihatinan mengenai kecenderungan penguatan imperialisme kebudayaan suatu kekuatan kultural dalam masyarakat kapitalistik modern yang berorientasi pada pemasaran dan pemakaian barang dan jasa pelayanan. Sebagai bentuk kebudayaan yang membedakan status dan membagi pangsa pasar dari masyarakat modern saat citra rasa individu tidak hanya merefleksikan lokasi-lokasi sosial (umur, gender, pekerjaan, etnik dan sebagainya) tetapi juga merefleksikan gaya hidup individu, para konsumen

Maka, berdasar pada semua sugu-

han itu, kalaulah kebudayaan dan seni dipandang sebagai ruang kontemplatif yang dapat melahirkan kearifan, pertemuan *people to people* ini tentu saja tidak sekadar bagaimana memeriahkan acara, lalu mengisinya dengan beragam perayaan sebuah hari ulang tahun. Tetapi harus menjadi sebuah catatan-catatan budaya pada masa mendatang.

Ini penting, karena jika Indonesia tidak membangun budaya tandingan (*counter culture*) akan menjadi bangsa terjajah di bidang ekonomi. Bangsa yang menjadi sasaran ideologi Neoliberalisme yang bertujuan agar bangsa/negeri korban menjadi bagi barang dan jasa. Sebab akibat yang muncul dari ideologi ini, kata Saini terbentuknya tata nilai (budaya) yang soko gurunya materi (materialisme). Pada posisi inilah menegaskan pentingnya pendidikan.

Oleh karena itu, besarnya pengaruh media massa menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini. Media massa dalam berbagai bentuknya, merupakan pilar keempat dalam proses pendidikan. Kehadirannya telah membentuk perilaku, sikap, dan pola pikir anak didik. Inilah yang belakangan dikenal sebagai *hidden curriculum* (kurikulum yang tersembunyi), yakni beragam bentuk media yang mempengaruhi berjalannya proses pendidikan dan perkembangan psikologis anak didik.

Ada beberapa paham yang ikut serta dalam media-media yang ditonton oleh anak-anak, yaitu paganisme, hedonisme, brutalisme, dan pornografi. Paham-paham tersebut secara nyata berbahaya terhadap berjalannya pendidikan dan pengajaran

di sekolah, karena adanya nilai-nilai yang saling bertubrukan. Dari sini jelas betapa berbahayanya pornografi di tinjau dari dimensi pendidikan.

Perkembangan pesat pornografi terjadi seiring reformasi. Kalau kita cermati, media-media berkategori 'X' tersebut sebenarnya sama sekali tidak memenuhi kriteria sebuah media. Selain penuh dengan gambar-gambar seronok dan merangsang, isi tulisannya pun jauh dari kaidah-kaidah jurnalistik. Apa yang dipaparkan tidak lebih dari cerita-cerita perangsang nafsu seksual.

Kehadiran media-media semacam ini telah memberikan dampak destruktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama di kalangan anak-anak. Merebaknya kasus-kasus amoral sebagian besar dipengaruhi oleh media bernuansa pornografi. Protes terhadap persoalan pornografi sebenarnya sudah banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun sayang, tidak banyak tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan, setiap kali protes dilakukan, yang berkembang justru perdebatan antara moralitas, seni, dan kebebasan.

Perkembangan pornografi semakin luas karena juga didukung oleh masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kita memiliki mentalitas ambigu. Pada satu sisi menolak pornografi, namun secara diam-diam justru mengonsumsinya. Implikasinya, meminjam kerangka teori fungsional-struktural Robert K Merton, sesuatu itu, termasuk media

pornografi, menjadi fungsional kalau ada yang menganggap penting dan membutuhkannya.

Mereka yang bergerak dalam industri media semacam ini tampaknya kurang menyadari bahwa produk pers memiliki tanggung jawab sosial. Ketika ekspose produk pers telah melampaui batas moralitas, maka kita harus melakukan tindakan secara nyata untuk menggugat dan mencegahnya. Karena media memiliki pengaruh secara signifikan terhadap realitas sosial.

PENUTUP

Kecenderungan peran media menyebutkan, media cenderung lebih banyak memperkuat perilaku dari pada mengubahnya. Bahkan aktivitas suatu media bisa saja tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pada orang yang menjadi sasarannya. Perubahan yang kecil sekalipun dapat terjadi tanpa aktivitas komunitas.

Namun media se-massif televisi mampu memebentuk dan mengubah persepsi dan perilaku atau akan membawa efek besar bila apa yang ditampilkannya tidak hanya melaporkan apa yang terjadi dalam masyarakat, tapi juga bertanggung jawab untuk melancarkan suatu gerakan masyarakat dan meyakinkan bahwa gerakan yang mereka lakukan itu pasti menguntungkan.

Beberapa riset etnografis-antropologis membuktikan bahwa pesan yang disampaikan media secara terus-menerus, menjadikan para pemirsa menggunakannya untuk mengatur

dan mengelola lingkungan mereka, memperlancar komunikasi antarpribadi, memperoleh akses pada sebagian orang dan institusi, mempelajari dan menerapkan perilaku dan peransosial baru, di samping ada pula yang menggunakannya untuk menghindari orang lain atau memakainya untuk mendominasi orang lain.

Dampak dari kehadiran media bisa berwujud dampak kognitif dan dampak emosional. Dampak kognitif berhubungan dengan pemikiran, sedangkan dampak emosional berhubungan dengan perasaan. Dampak kognitif juga mencakup aspek niat, tekad, upaya, dan usaha yang berkecenderungan untuk diwujudkan menjadi kegiatan. Jika pengaruh negatif berdampak pada taraf kognitif dari kesadaran masyarakat, maka pada titik inilah perilaku dan moralitas permisif akan semakin meluas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- AlFaruki, J. 2006. *Kembalikan Indonesiaku*. <http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-October/000575.html> 2:32 PM 10/4/2006
- Bakker, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius
- Budiawan, M.H. 2004. "Perkembangan Komik Indonesia (1935-1985)". Skripsi Tidak Diterbitkan. Jatinangor: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjajaran.
- Chaffe, S.H. 2002. *Political Communication dalam Dahmke*. G.L. 2002. *Human Communication: Theory and Research*. Belmont, Ca.: Wadsworth
- Djarot, E. 2005. *Saatnya Duduk Bersama*. http://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=6357&coid=3&caid=3 12:33 PM 10/4/2006
- McChesney, R. 2006. *Global media, neoliberalism & imperialism* International Socialist Review, Aug/Sep. 2001. http://www.thirdworldtraveler.com/McChesneyGlobalMedia_Neoliberalism.html 2:34 PM 10/4/2006
- Rajab, B. 26 Januari 2000. *Pencitraan Perempuan Dalam Media*. <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/26/0802.htm> 6:07 PM 2/27/2006
- Rakhmat, J. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Edisi 21. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Salim, A. 2002. *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Steger, M. 2002. *Globalisme. Bangkitnya Ideologi Pasar*. Yogyakarta: Lafadl.
- Subiakto, H. 2006, <http://www.riapos.com/web/content/view/9393/1/> 12:33 PM 10/4/2006
- Wuryanta, A.G.E.W. *Tarik Ulur Globalisasi Media Vs Kepentingan Publik Di Indonesia. (Refleksi Perspektif Etis Regulasi Media Massa Dalam Konteks Transisi Menuju Demokrasi Indonesia Dan Globalisasi Media)*